

**PERAN DISPORA PROVINSI RIAU DALAM PEMBINAAN ATLET PELAJAR
MELALUI PROGRAM PUSAT PENGEMBANGAN DAN LATIHAN OLAHRAGA
PELAJAR (PPLP) TAHUN 2015-2017**

Oleh: Jaka Permana

Email: jakeper007@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S. IP, M. IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The PPLP program is an education and training center for talented student athletes which is a manifestation of the system of organizing training to achieve the desired results, increasing performance in national and international sports. This research is motivated by the role in fostering the athletes of PPLP students in Riau Province in 2015-2017 which is carried out by Dispora but in its implementation experiences various problems, such as the achievements and quality of athletes which are declining every year. The purpose of this study is to analyze the problems that occur in the implementation of the program that causes a decrease in athlete achievement. The method used in this research is descriptive method with the type of qualitative research. The type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis. The results showed that the role of Dispora in coaching PPLP athletes in Riau Province was not running optimally. This can be seen from the not yet effective planning of activity programs. There are inhibiting factors both in terms of internal and external; provision of facilities and infrastructure that are not yet efficient and do not create coordination between the same level institutions. The right solution to overcome the problems in the PPLP program management process is to create a neater and more effective program planning and produce policies that can improve coordination between each institution concerned.

Keywords: *Planning of sports activities, maintenance of sports facilities and dormitories, organizing try outs and competitions, achievements*

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dalam mengembangkan kegiatan keolahragaan secara mandiri.

Kementerian Olahraga Selaku penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional memiliki tugas untuk menetapkan arah kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, pasal 2. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, pasal 12, 30 dan 39 yang menjelaskan pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Provinsi Riau, serta mengatur tentang kedudukan dan tugas pokok dinas daerah tersebut.

Peran pemerintah daerah melalui Dispora dalam memaksimalkan potensi para atlet dan mampu memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan prestasi atlet. Saat ini keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional. Upaya pemerintah daerah Provinsi Riau untuk pengembangan potensi olahraga yang berorientasi pada produktifitas masyarakat tentu saja membutuhkan stimulasi bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal. Untuk itu, pemerintah provinsi Riau menyiapkan, menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi menyiapkan angkatan muda untuk dapat

berkompetisi diajang nasional dan internasional serta diarahkan pada pembangunan sosial yang positif yang kemudian diterapkan di Provinsi Riau sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi olahraga masyarakat.

Dilihat dari potensi yang ada di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau melalui UPT. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau melakukan peningkatan olahraga secara bertahap melalui berbagai kegiatan, salah satunya membentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) sebagai wadah pendidikan dan pembinaan atlet pelajar berbakat yang merupakan wujud dari sistem penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai hasil yang diinginkan, meningkatkan prestasi dalam ajang keolahragaan nasional dan internasional. Pembentukan PPLP bertujuan untuk menciptakan atlet pelajar yang potensial dan berprestasi baik dibidang pendidikan maupun bidang olahraga yang dapat dibina secara terpusat sehingga proses pelatihan bagi para atlet akan lebih intensif dan pendidikan akademisnya tidak tertinggal.

Pembangunan olahraga selama ini dilaksanakan lewat dua jalur, yang pertama melalui pendidikan, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional, dan kedua adalah pembangunan olahraga lewat jalur masyarakat yang penyelenggaraannya selama ini dikoordinasikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KONI bersama DISPORA berkerja sama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan di Provinsi Riau.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau sebagai pemeran utama dalam pembinaan atlet Provinsi Riau membuan Rancangan Program yang dituangkan ke dalam RENSRA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun 2014-2019, sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- c. Program Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- f. Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olahraga
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan.

Perkembangan prestasi PPLP di Kejuaraan Nasional maupun daerah tahun 2015-2017 mengalami penurunan di beberapa cabang olahraga. Penurunan ini tentunya hal yang penting untuk dilakukan evaluasi dan pemahaman pembinaan atlet PPLP Riau. Fokus penelitian ini yaitu pada Kejuaraan Nasional antar PPLP dikarenakan hanya Kejuaraan Nasional yang Dispora selenggarakan sepenuhnya dan Dispora Provinsi Riau lebih memfokuskan prestasi kepada Kejuaraan Nasional. Selain itu ditambah lagi kondisi infrastruktur venue yang tidak mendukung peningkatan prestasi atlet PPLP Riau, penyediaan venue untuk latihan atlet PPLP dianggap tidak efisien karena letak venue yang terpisah pisah dan beberapa venue berada jauh dari asrama yang sudah disediakan.:

Adapun identifikasi permasalahan PPLP Riau dalam proses pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, diantaranya:

1. Prestasi atlet PPLP pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan di beberapa cabang olahraga.
2. Beberapa venue yang tersedia sebagai penunjang pengembangan dan latihan atlet PPLP dianggap tidak efisien dikarenakan beberapa venue yang memiliki jarak cukup jauh dengan asrama atlet PPLP, sehingga untuk melaksanakan

pengembangan dan latihan mengalami banyak kendala.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DISPORA Provinsi Riau dalam pembinaan atlet pelajar dalam program pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat peran DISPORA Provinsi Riau dalam pembinaan atlet pelajar dalam program pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran DISPORA Provinsi Riau dalam pembinaan atlet pelajar dalam program pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP)
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat peran DISPORA Provinsi Riau dalam pembinaan atlet pelajar dalam program pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP)

Kerangka Teori

Teori Manajemen Pemerintahan

Muhammad Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan di arahkan agar terlebih dulu mendefenisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian, dan tenaga kerja yang dikerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan, dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.¹

¹Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2000., hlm 148-149

Fungsi manajemen berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat dicapai secara tertib, efektif, dan efisien. Inu Kencana Syafii mengatakan bahwa fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaporan, pembiayaan, pengaturan, pengarahan, pendorongan, dan pengomandoan. Dharma Setyawan Salam merumuskan fungsi manajemen menjadi Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan Staf (Departemenisasi), Penggerakan, Pengendalian.²

Menurut Muhammad Ryaas Rasyid, Pelaksanaan manajemen pemerintahan mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan kebijakan dan program

Perencanaan kebijakan dan program. Kegiatan ini didahului oleh penelitian dan analisa atas berbagai bidang permasalahan.

2. Pengorganisasian atas struktur pemerintahan

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan yang mencakup upaya menjaga keserasian dalam hubungan antar departemen, membina keseimbangan antara otonomi dan integrasi, mengalokasikan program dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, membina hubungan lini dan staf, memelihara hubungan antara kantor pusat dan unit-unit lapangan, memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong partisipasi.

3. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan yang mencakup penyeimbangan antara pembelanjaan dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran,

pengalokasian uang dari hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan pada setiap tingkatan. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran, penerapan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan pada aturan yang berlaku, serta pendayagunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan stabilitas.

4. Pembinaan dan pengembangan personil

Pembinaan dan pengembangan personil yang mencakup penyeleksian calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin, dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyegaran. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Ini dikembangkan dalam konteks kompetisi. Kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu diberi imbalan penghargaan dan promosi.

5. Pengambilan keputusan secara umum.

Pengambilan keputusan yang secara umum berkenaan dengan pendefinisian masalah yang dihadapi, perumusan jalan keluar yang layak atas masalah, serta penentuan strategi untuk membangun dukungan bagi pemecahan masalah itu. Secara spesifik ia mencakup penentuan tujuan dan rencana untuk mencapainya, perumusan kebijakan, penugasan kepada siapa suatu kebijakan dipercayakan pelaksanaannya, penentuan strategi untuk pelaksanaan kebijakan, serta ketelitian dalam menaati prosedur administrasi dan hubungan hukum.

6. Program pengelolaan

Program pengelolaan yang mencakup kepemimpinan, delegasi kewenangan, dan penugasan-penugasan

²Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm 16

yang lebih spesifik kepada unit-unit dan pejabat-pejabat, serta koordinasi.

7. Pengawasan

Pengawasan yang mencakup penegakan hukum, pertanggungjawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku.³

Manajemen pemerintahan daerah yang baik haruslah berbasis kinerja. Dalam otonomi daerah, manajemen pemerintahan daerah selain berbasis kinerja, harus pula berbasis transparansi dan akuntabilitas. Manajemen yang efisien berarti segala kegiatan yang menggunakan input yang menghasilkan out-put dengan biaya produksi terendah, atau dikatakan tidak terjadi pemborosan. Manajemen yang efisien dan efektif dikatakan sebagai manajemen berkinerja tinggi. Manajemen yang efektif diartikan mampu mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang direncanakan.⁴

Dengan sistem manajemen pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah, yang meliputi (a) menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, (b) melaksanakan pembangunan daerah secara merata, dan (c) menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat, murah, mudah, dan berkualitas, akan terselenggara pula dengan baik.⁵

Teori Pembinaan

Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “pembinaan Organisasi” mendefinisikan pengertian

pembinaan bahwa : Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change). Pembinaan merupakan pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.⁶

Menurut Sunindhia terdapat perbedaan dan sifat pembinaan yang perlu diketahui kedudukan unsur-unsur organisasinya, yaitu⁷ :

1. Unsur Pimpinan, adalah suatu unsur yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pembinaan secara umum.
2. Unsur Pembantu Pimpinan, adalah suatu unsur yang berkewajiban dan bertugas serta berkedudukan sebagai unsur staff, yaitu memikirkan penyusunan dan merumuskan segala sesuatu yang berkenaan dan berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan umum oleh unsur pimpinan.
3. Unsur Pelaksana, adalah suatu Unsur yang berkewajiban dan bertugas menyelenggarakan salah satu bagian atau beberapa bagian atau pun keseluruhan kegiatan pekerjaan/usaha

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di

³Ryaas Rasyid, *Op. Cit.*, Hlm 150-152

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011., hlm 4

⁵ *Ibid.*, hlm 5

⁶ Miftah Thoha, “*Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa & Intervensi*”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004 hlm 17

⁷ Sunindhia Y.W, “*Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*”, Bina Aksara: Jakarta, 1987 hlm 96-97

Pembahasan

1. Peran DISPORA Provinsi Riau dalam Pembinaan Atlet Pelajar Melalui Program Pusat Pengembangan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)

Dinas Pemuda dan Olahraga demi mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkannya menyusun beberapa program, termasuk didalamnya program Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Dengan demikian, agar terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya pada pelayanan keolahragaan, dibutuhkan manajemen pemerintahan sebagai berikut :

1.1 Perencanaan dan Kebijakan Program

Dalam hal ini, perencanaan kebijakan dan program PPLP dilaksanakan DISPORA Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Rencana Strategi (RENSRA) DISPORA tahun 2014 – 2019. Penetapan Renstra ini disusun guna sebagai pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengelola segala kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga mengatur kebijakan dan membuat program PPLP sudah pasti memiliki alasan yang kuat. Selain olahraga yang sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat, banyak masyarakat yang menyenangi olahraga, besarnya jumlah anak usia dini yang berpotensi dalam keolahragaan juga merupakan salah satu alasan dibuatnya program PPLP. Selain itu kekayaan alam yang luas dan yang dipandang Dispora sebagai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi lahan yang menjanjikan bagi perkembangan wisata olahraga juga dijadikan alasan yang kuat dalam pembuatan program PPLP.

Namun rendahnya motivasi orang tua terhadap anak untuk menekuni olahraga serta masih banyaknya sarana dan

prasarana yang belum memenuhi standar membuat Dispora harus bekerja ekstra dalam menggali potensi olahraga anak usia dini dan dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.

Berdasarkan tabel rencana strategi Dispora dapat dilihat bahwa target atlet maupun jumlah anggaran untuk program PPLP di segala cabang olahraga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 target atlet yang akan dibina dalam program PPLP berjumlah 197 atlet dengan anggaran Rp. 12.133.700.000, Pada tahun 2016 target atlet diharapkan mencapai 347 orang atlet dengan penyediaan anggaran meningkat menjadi Rp. 29.465.000.000, ditahun 2017 target atlet 430 dengan anggaran Rp. 35.862.000.000. dan seluruh anggaran ini berdasarkan dana APBD Provinsi Riau.

1.2 Pengorganisasian atas Struktur Pemerintahan

Dalam hal ini, pengorganisasian atau struktur pemerintahan dalam pengolahan program PPLP ini dibina oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga beserta Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan juga KONI sebagai pembina pada program PPLP memiliki tugas memberikan arahan dan bimbingan demi kelancaran serta kesuksesan pembinaan. Namun berbeda dengan KONI dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam proses pembinaan, seperti halnya KONI sebagai pelaksana kegiatan yang berurusan dengan penyelenggaraan kegiatan pertandingan.

Kepala dan bidang pembibitan dan pembinaan olahraga beserta sub bidang memiliki tugas menyusun rencana program kerja tahunan, mengupayakan suberdaya tambahan untuk menjamin kelancaran proses pembinaan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan instansi terkait, melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas. Pelatih memiliki

tugas menyusun program latihan jangka panjang menengah dan jangka pendek, melaksanakan latihan dan mencatat hasil latihan, melakukan tes dan evaluasi, melaporkan perkembangan latihan dan prestasi pelajar kepada penanggungjawab. Bagian akademik bertugas membantu pelajar dalam pengurusan sekolah, mengawasi kegiatan belajar di asrama, melaporkan perkembangan belajar secara periodik kepada penanggungjawab PPLP. Tugas sarana prasarana merencanakan, mengadakan dan memelihara perlengkapan serta peralatan asrama, alat latihan dan segala perlengkapan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Peran DISPORA, KONI, dan Pengcab Dalam Pembinaan PPLP

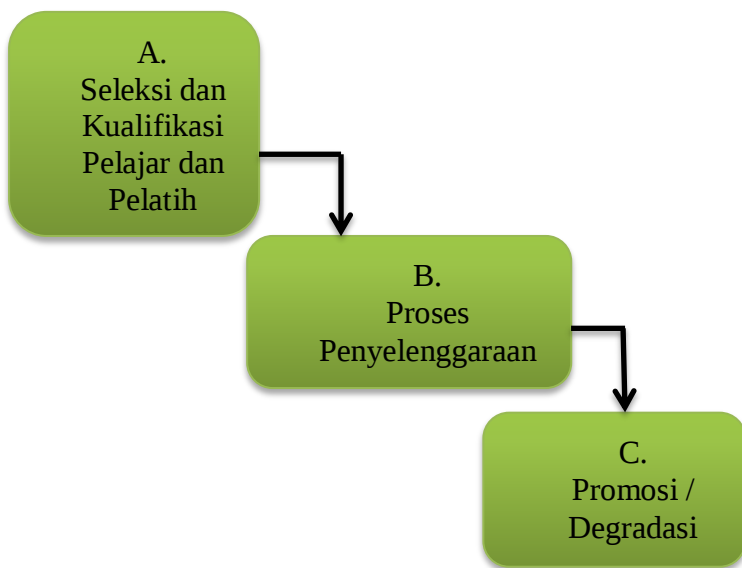
DISPORA	KONI	PengCab
-Menyusun rencana program kerja tahunan - Mengupayakan sumberdaya tambahan untuk menjamin kelancaran kegiatan PPLP - Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan instansi terkait Melakukan evaluasi secara berkala - Menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas dan Dilanjutkan kepada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	-Membantu proses perekrutan atlet - Bertanggung jawab dalam proses perlombaan PPLP - mengoptimal kan program beasiswa untuk atlet dan pelatih	- Merekomendasikan pelatih - mengoptimal kan program sertifikasi pelatih dan wasit

1.3 Pembinaan dan Pengembangan Personil

Pembinaan dan pengembangan personil yang mencakup penyeleksian calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin, dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan

pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyegaran. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Ini dikembangkan dalam konteks kompetisi. Kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu diberi imbalan penghargaan dan promosi.

Adapun Mekanisme pengelolaan PPLP diatur sesuai dengan diagram di bawah ini:



A. Seleksi dan Kualifikasi

Pada proses seleksi dan kualifikasi pelajar dan pelatih PPLP ini, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan melibatkan Dinas Pendidikan, Pengurus Daerah Cabang Olahraga dan KONI Provinsi. Hasil seleksi diumumkan melalui panggilan yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan / Dinas Pemuda Olahraga / pengurus cabang olahraga bersangkutan. Keputusan diterimanya pelatih maupun pelajar ditandai dengan surat keputusan dari Dinas yang menangani PPLP.

B. Proses Penyelenggaraan

Setiap pengelola PPLP mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan baik secara teknis maupun non teknis. Adapun aktivitas dan prosedur pembinaan PPLP adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Latihan

Pelatih diwajibkan menyusun program latihan tahunan dan dijabarkan pada program latihan mingguan dan harian. Program latihan tahunan disusun berdasarkan kalender kompetisi yang ada di induk organisasi cabang olahraga masing-masing. Disarankan untuk puncak prestasi setiap tahun ditempatkan pada Kejuaraan Nasional Nasional antar PPLP. Sedangkan kejuaraan yang lain ditempatkan sebagai sasaran antara latihan atau try-out.

Dari jadwal kejuaraan yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga beserta instansi terkait lainnya, pelatih dapat menyusun program latihan dengan periodisasi yang ada.

2. Tes dan Monitoring

Tes sebagai kontrol kemajuan latihan dan kondisi kesehatan pelajar harus dilaksanakan secara periodik. Tes kontrol latihan yang meliputi tes fisik dan teknik dilaksanakan sesuai dengan pelatih cabang olahraga masing-masing dengan konsultasi Pengurus PPLP lainnya. Sedangkan tes kesehatan dilakukan bersama dengan pelaksanaan urusan kesehatan untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan pelajar.

Monitoring dilakukan oleh Sekretaris Bidang Pembinaan, Bidang IPTEK dan Prestasi Olahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Selama monitoring, petugas monitoring akan menanyakan berbagai kegiatan teknis seperti, pengecekan program dan pelaksanaan latihan, catatan hasil latihan dan sebagainya.

3. Kompetisi dan try-out

Setiap PPLP wajib untuk mengikuti kompetisi minimal dua kali pertahun. Satu kompetisi yang bersifat latihan (try-out) dan satu kompetisi yang merupakan puncak prestasi sebagai sarana evaluasi perkembangan prestasi pada tahun tersebut.

C. Promosi /Degradasi

Hasil evaluasi akan menentukan apakah berbagai faktor kegiatan dalam PPLP dapat dapat diteruskan atau

dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi atau harus dilakukan sebuah peringatan dan koreksi atau bahkan terjadi degradasi pada unsur-unsur PPLP.

Adapun unsur-unsur tersebut meliputi : pengelola, pelatih, pelajar, dan situasi fisik PPLP seperti asrama dan sarana prasarana latihan.

1. Pelajar

Promosi ditandai dengan diberikannya rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut di jenjang yang lebih tinggi yaitu PPLM / Perguruan Tinggi atau di Pengurus Provinsi Cabang Olahraga yang bersangkutan.

Degradasi ditandai dengan pemulangan / dikeluarkan pelajar bila hasil evaluasi menunjukkan :

- a. Pelajar telah menyelesaikan studinya di sekolah menengah sehingga harus keluar dari PPLP secara otomatis.
- b. Pelajar pada periode tertentu tidak menunjukkan perkembangan prestasi, atau terjadi penurunan prestasi.
- c. Pelajar tidak mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
- d. Pelajar tidak dapat mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh pengelola PPL (indisipliner)

2. Pelatih

Pelatih dapat direkomendasikan untuk layak dipertahankan bila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatnya prestasi atlet.

Pelatih dapat direkomendasikan untuk diberhentikan bila hasil evaluasi menunjukkan :

- a. Tidak mampu menjalankan tugasnya secara konsisten.
- b. Tidak mampu meningkatkan prestasi atlet yang ditangani dalam kurun waktu tertentu.
- c. Tidak dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola PPLP (indisipliner)
- d. Setelah tahap promosi / degradasi, PPLP secara siklus kembali ke

langkah awal yaitu :

menyelenggarakan tes dan seleksi masuk bagi anggota baru (pelajar atau pelatih) bila memang terjadi kekosongan tempat dalam proses promosi-degradasi.

3. Pengelolaan PPLP

Pengelolaan cabang olahraga dalam PPLP, dapat direkomendasikan untuk dilanjutkan atau diganti dengan cabang olahraga yang lain melalui proses evaluasi. Cabang olahraga dapat dilanjutkan bila menunjukkan perkembangan prestasi.

Cabang olahraga dapat direkomendasikan untuk diganti bila tidak menunjukkan perkembangan prestasi.

Hasil evaluasi dapat juga merekomendasikan pengelolaan PPLP di suatu daerah tidak dapat dilanjutkan.

1.4 Pengawasan

Pengawasan yaitu proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup penegakan hukum, pertanggungjawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku. Pengawasan terhadap program pembinaan PPLP ini dilakukan oleh pihak Bidang Pembibitan, Deputy Bidang IPTEK dan Prestasi Olahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa pentingnya pengawasan oleh pemerintah kepada program PPLP karena menilai pentingnya program ini demi kelangsungan atlet dimasa depan sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta diikutsertakan KONI, PENGAB dan instansi lain yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan PPLP. Sementara itu dapat dilihat bahwa kekurangan petugas

lapangan akan mempengaruhi kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan kontrol terhadap perkembangan atlet. Hal ini juga dapat menjadi penyebab menurunnya prestasi atlet yang disebabkan kurangnya pengawasan dalam perkembangan atlet, tidak adanya bentuk pengawasan dalam kedisiplinan atlet

2. Faktor-Faktor yang Menghambat DISPORA Dalam Pembinaan Atlet Pelajar PPLP Provinsi Riau

Dalam melakukan pelaksanaan program pembinaan atlet pelajar melalui PPLP, Dinas Pemuda dan Olahraga terdapat beberapa faktor yang menghambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Memahami faktor-faktor tersebut dari segi faktor Internal dan faktor Eksternal,. Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Dinas Pemuda dan Olahraga , mengingat pentingnya memaksimalkan potensi calon calon atlet masa depan memiliki kemampuan yang baik dan juga penting untuk memunculkan formulasi strategi dalam meningkatkan potensi atlet. Adapun faktor yang menghambat DISPORA dalam pembinaan PPLP diantaranya sebagai berikut:

2.1 Faktor Internal

Terbatasnya dana untuk pengelolaan mengakibatkan kurang efektifnya pembinaan, terbatasnya dana juga menyebabkan tidak maksimalnya penyediaan tempat latihan bagi para atlet. Untuk meningkatkan pembinaan terhadap Atlet, maka dibutuhkan tempat latihan seluruh cabang olahraga yang cukup memadai dilingkungan asrama agar pembinaan dan kegiatan seluruh Atlet dapat terpantau secara efektif.

Tidak tersedianya tempat latihan atlet yang kompleks, yang dekat dengan asrama dan cenderung terpisah dengan cabang olahraga lain, mengakibatkan penyelenggaraan latihan sedikit kurang

efektif karena kendala jarak dan waktu yang lama untuk mencapai tempat latihan, dan sering juga tidak latihan karena alasan tertentu. Diharapkan pihak pemerintah dapat memfasilitasi atau membangun sarana dan prasarana di lingkungan asrama agar pembinaan yang dilakukan sesuai dan pengawasan yang di tujukan kepada atlet dapat terfokus dan terlaksana dengan baik.

2.2 Faktor Eksternal

Kurang terpadunya sistem manajemen pengelolaan serta kurang terpadu dan selarasnya kebijakan pembinaan olahraga merupakan penyebab lemahnya koordinasi dan kerjasama antarorganisasi atau lembaga yang juga terlibat didalam program pembinaan PPLP. Dalam Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/MENPORA/2005 tentang pedoman pengelolaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) dijelaskan bahwa pembina dari program ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta penanggung jawab melibatkan Dinas Pendidikan dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan juga KONI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa pembinaan program Pusat Pengembangan dan Latihan olahraga pelajar memiliki kendala yang terjadi antara hubungan dari lembaga lembaga yang bersangkutan seperti KONI, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga ataupun dinas terkait lainnya tidak terjalin dengan baik dikarenakan kebijakan yang tidak sesuai dengan masing-masing lembaga sehingga tidak berjalan dengan maksimal pelaksanaan program ini. Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu menciptakan keserasian kebijakan antara setiap stick holder program ini serta dapat menjaga hubungan antar lembaga agar berjalan dengan maksimalnya Pusat Pengembangan dan Latihan Olahraga Pelajar ini.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya, peran Dispora dalam pembinaan PPLP masih belum berjalan optimal, dan output dari komponen Program pembinaan PPLP belum berhasil meningkatkan prestasi atlet. Hal ini dapat dilihat dari belum baiknya koordinasi antara masing-masing pengelola program PPLP dalam satu struktur. Lembaga lain yang bertanggungjawab dalam program ini, hampir tidak terlibat dalam proses pembinaan serta pengawasannya. Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurang efektif dan efisiennya tempat latihan yang disediakan Dispora untuk digunakan latihan para Atlet, tempat latihan cenderung terpisah dari setiap cabang olahraga dan jauh dari asrama dirasa mempengaruhi proses latihan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau agar dapat menyusun regulasi, dasar hukum dan kebijakan yang bisa menciptakan interkoneksi dan keterpaduan dengan seluruh lembaga bersangkutan. Dengan terciptanya kerjasama antar lembaga maka semakin ringan dalam pelaksanaan programnya. Dan diharapkan Dispora dapat menciptakan tempat latihan atau venue yang efektif dan efisien untuk para atlet agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, serta membuat tempat latihan yang dekat dengan asrama dan terfokus dalam satu lingkungan agar pengawasan yang dilakukan tidak sulit.

Daftar Pustaka

Buku.

- Ahmad, Tanzeh. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Teras: Yogyakarta.
- Adi Sasmita, Rahdjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Kencana, Inu syafiie, 2011 Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Moleong, J Lexy, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 2010. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. PT. Perca: Jakarta.
- Nawawi, Zaidan. 2015. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Patiliman, Hamid, 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, Ryaas, 2000, Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan), Jakarta : Mutiara Sumber Widya
- Setiawan, Dharma Salam, 2004 Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Djambatan.
- Silalahi, Ulber, 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunindhia, Y.W. 1987. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Bina Aksara: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2004. Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa & Intervensi. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijadja, HAW. 2000. Manajemen Organisasi. Rajawali Press: Jakarta.

Jurnal/Skripsi

Bachtira, 2006, “Evaluasi Pelaksanaan Pusat Latihan Olahraga Pelajar di SMU Negeri 9 Banda Aceh Tahun 2006” FKIP PGSD Unsyiah.

Wangsa, Juana Putri dan Budi Aryanto Muslim, 2017, “Evaluasi Penyelenggaraan PPLP Taekwondo Provinsi DKI Jakarta” DISPORA DKI Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau No 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Dokumen Lainnya

Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyelenggaraan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).

Rencana Strategi (RENSRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2014-2019